



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
Tahun 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEKUNG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kecamatan Tekung Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025–2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025 disusun sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta penutup.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026. Disamping menyajikan data perencanaan Renja juga menyajikan kinerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan / sub kegiatan yang direncanakan dalam mendukung program Pemerintah Daerah.

Tekung, januari 2025
CAMAT TEKUNG

SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 19831106 200112 1 001

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 7 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU..... | 8 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD..... | 8 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 25 |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... | 29 |
| 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... | 33 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 49 |
| 2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah..... | 51 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... | 57 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | 57 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... | 59 |
| 3.3. Program dan Kegiatan..... | 61 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD..... | 87 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 94 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – Perangkat Daerah), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Tekung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- i. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial menguraikan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- ii. Renja merupakan dokumen dasar penyusunan program kegiatan OPD/Perangkat Daerah ke dalam KUA dan PPAS serta penyusunan dan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
- iii. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggung jawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan

pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menyusun Dokumen Renja 2025 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan dating tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan. Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra). Rencana Kerja Kecamatan Tekung menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

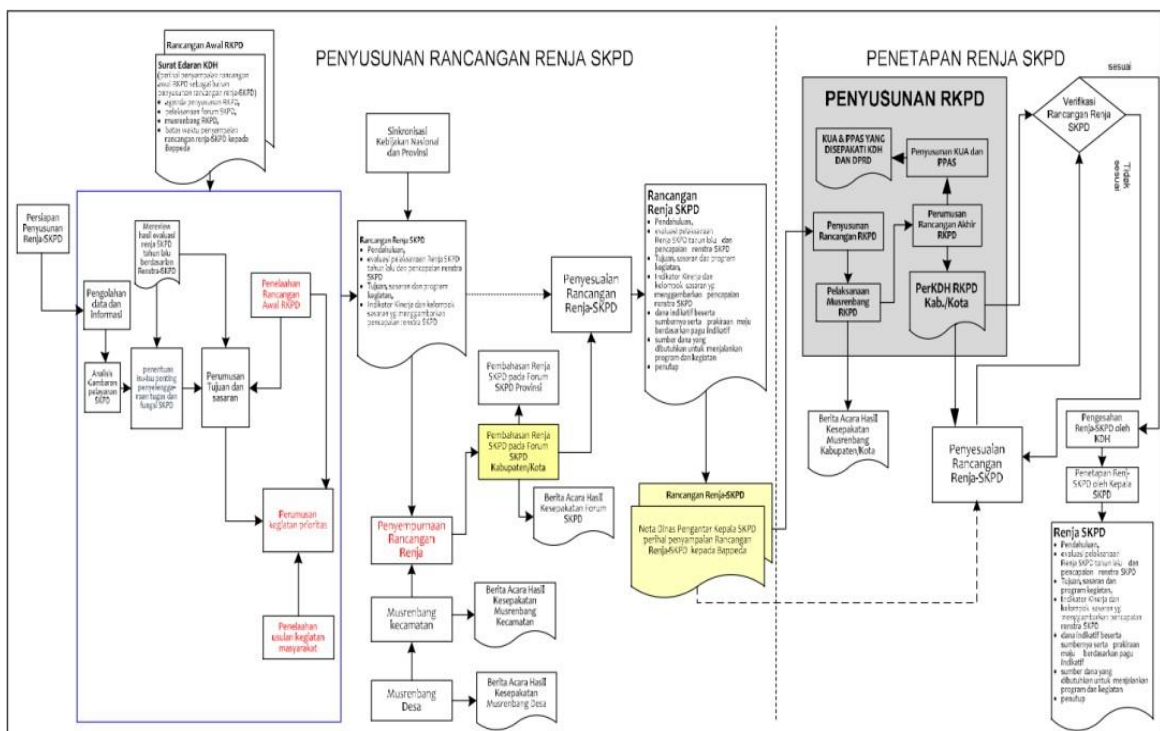
1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintah dalam setahun. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Gambar 1.1.

Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

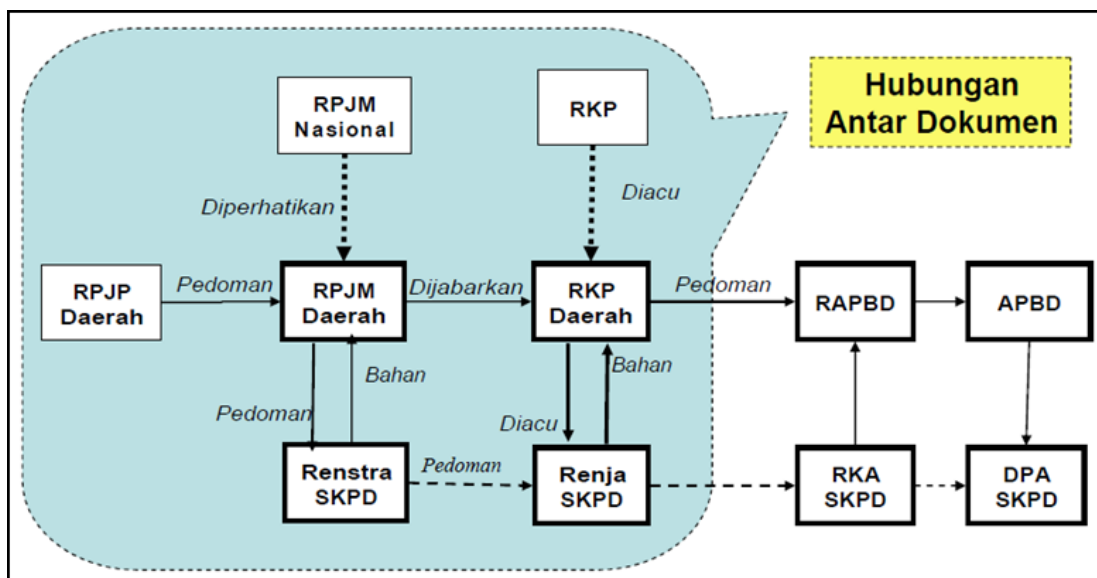


1.1.3. Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu tiga tahun. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.2.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan;
12. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Tahun 2001 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pengarusutamaan gender (PUG);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahunn 2024 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

Tujuan pembangunan kecamatan yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun kedepan.

Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arahan terhadap program pembangunan kecamatan secara umum untuk tiga tahun kedepan dan menetapkan tujuannya yaitu Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang terdiri dari 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.Telaahan
terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Tujuan dan
sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3.Program
dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan Tahun n-1 (2024) berdasarkan target indikator kinerja program tidak memenuhi target P-Renstra. Terdapat 2 Program, 4 Kegiatan dan 6 Sub kegiatan yang tidak memenuhi target sesuai Perencanaan Renstra dan Renja. Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - A. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
2. Program Koordinasi dan Ketertiban Umum
 - A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di maksud direncanakan dalam Renstra 2024 - 2026, namun demikian dikarenakan keterbatasan

ketersediaan anggaran maka kegiatan dimaksud tidak dapat direalisasikan pada tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut maka mempengaruhi terhadap capaian target Renstra sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.1

TC 29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Lumajang**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tekung

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P- Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023 | | | Target K Program/Keg Kegiatan tah 2024 (Ren |
|--------------|---|---|---|--|--|--|--------------------------|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023 | Tingkat Realisasi (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 |
| 7.01.01.2.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 80% | 100% | 99,7% | 100% | 100% | 80% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 7.01.01.2.01.01 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | 100% | 140% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.01.02 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 2 Dokumen |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Doku |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 Doku |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Asn | 21 ASN | 12 Asn | 12 Asn | 100% | 14 A |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dok |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 10 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 5 Lapo |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 86 paket | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Lapo |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------|--------|
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 23 paket | 15 Paket | 15 Paket | 100% | 15 Pa |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 43 Paket | 86 paket | 42 Paket | 42 Paket | 100% | 43 Pa |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 10 paket | 3 Paket | 3 Paket | 100% | 4 Pak |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 10 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Lap |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-------------|------------|------------|------|--------|
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 322 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Lap |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | N/A | 5 Unit | 6 Unit | 100% | 3 Ur |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor | 100% | 160% | 100% | 67% | 67% | 100% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|--------------|------------|------------|------|---------|
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 0 Laporan | 12 Laporan | - | 0% | 12 Lapo |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 6 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 3 Lapo |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 24 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Lapo |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD | 90% | 150% | 90% | 67% | 74% | 90% |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit | 10 Kendaraan | 8 Unit | 8 Unit | 100% | 8 Un |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------|---------|--------|--------|------|------|
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 5 Jenis | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 5 Ur |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | N/A | 1 Unit | - | 100% | 1 Ur |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP | 81% | 100% | 81% | 0% | 0% | 81% |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 81% | 100% | 80% | 0% | 0% | 80% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------|
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 24 Laporan | 12 Laporan | - | 0% | 12 Lap |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 92% | 100% | 92% | 83,35% | 91% | 92% |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 86% | 200% | 86% | 86% | 100% | 86% |
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 40 Lembaga | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 6 Lemb Kemasyar |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|------------|-----------|------|--------|
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 0 | N/A | - | - | 0% | |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 24 Laporan | 12 Laporan | 3 Laporan | 100% | 3 Lapo |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | 90% | N/A | 90% | 0% | 0% | 90% |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-------------|---|----|-------------|
| 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 60 Keluarga | 20 Lembaga | 20 Keluarga | - | 0% | 20 Keluarga |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-------------|---|----|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-------------|---|----|-------------|
| 7.01.03.2.06.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 60 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga |
| 7.01.03.2.06.03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 60 Keluarga | 12 Laporan | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga |
| 7.01.03.2.06.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 2 Keluarga | 12 Laporan | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|-----|-------------|------|----|---------|
| 7.01.03.2.06.05 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 2 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | 1,00 | 2% | 30 Kelu |
| 7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 315 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | - | 0% | 60 Kelu |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|-----|-------------|------|----|-------------|
| 7.01.03.2.06.07 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 2 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | 1,00 | 2% | 30 Keluarga |
|-----------------|---|--|------------|-----|-------------|------|----|-------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|-----|-------------|------|----|-------------|
| 7.01.03.2.06.08 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 315 Keluarga | N/A | 20 Keluarga | - | 0% | 20 Keluarga |
| 7.01.03.2.06.09 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 2 Keluarga | N/A | 20 Keluarga | 1,00 | 2% | 20 Keluarga |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|-----|-------------|---|----|-------------|
| 7.01.03.2.06.10 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 0 Keluarga | N/A | 0 Keluarga | - | 0% | 0 Keluarga |
| 7.01.03.2.06.11 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 0 Keluarga | N/A | 20 Keluarga | - | 0% | 20 Keluarga |
| 7.01.03.2.06.12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 150 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|-----------|--------------|----|----|---------|
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM' | Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 0% | 86% | 0% | 0% | 86% |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum | 1 Fasilitasi | 0 Laporan | 6 Fasilitasi | 0 | 0% | 6 Fasil |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 0 Laporan | 2 Laporan | - | 0% | 2 Lapo |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|-----|-------------|-------------|------|-------------|
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 86% | N/A | 86% | 100% | 116% | 86% |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 3 Fasilitas | N/A | 4 Fasilitas | 4 Fasilitas | 100% | 4 Fasilitas |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3 Dokumen | N/A | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu | 80% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------|-----|--------|--------|------|------|
| | | Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu | 80% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu | 60% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu | 8 Desa | N/A | 8 Desa | 8 Desa | 143% | 8 De |
| | | Jumlah Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu | 8 Desa | N/A | 8 Desa | 6 Desa | 86% | 8 De |
| | | Jumlah Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu | 8 Desa | N/A | 8 Desa | 8 Desa | 167% | 8 De |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 7.01.06.201.01. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 64 Dokumen | N/A | 64 Dokumen | 64 Dokumen | 260% | 64 Dokumen |
| 7.01.06.201.02. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 8 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 260% | 12 Dokumen |
| 7.01.06.201.03. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | 8 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 260% | 12 Dokumen |
| 7.01.06.201.04. | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 4 Laporan | N/A | 4 Laporan | 4 Laporan | 260% | 4 Laporan |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|--------|
| 7.01.06.201.05. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Dokumen | N/A | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 260% | 1 Doku |
| 7.01.06.201.06. | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 Dokumen | N/A | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 260% | 0 Doku |
| 7.01.06.201.07. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen | N/A | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 260% | 1 Doku |
| 7.01.06.201.08. | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2 Dokumen | N/A | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 260% | 2 Doku |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|
| 7.01.06.201.09. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8 Dokumen | N/A | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 260% | 8 Dokumen |
|-----------------|--|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tekung

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada Akhir Periode (P-Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) - 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2) - 2023 | | | Target Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2024 (Renja PD) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 | |
|--------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2023 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)- 2023 | Tingkat Capaian Realisasi Target (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=5+7 | 11=(10/4) |
| 7.01.01.2.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 80% | 100% | 99,7% | 100% | 100% | 80% | 100% | 125% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 7.01.01.2.01.01 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | 100% | 140% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7.01.01.2.01.02 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% | 3 Dokumen | 6 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Asn | 21 ASN | 12 Asn | 12 Asn | 100% | 14 Asn | 14 Asn | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 100% |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 10 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 5 Laporan | 10 Laporan | 100% |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
| 7.01.01.2.03.06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 86 paket | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 1 Laporan | 2 Laporan | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 15 Paket | 23 paket | 15 Paket | 15 Paket | 100% | 15 Paket | 30 Paket | 100% |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 43 Paket | 86 paket | 42 Paket | 42 Paket | 100% | 43 Paket | 86 Paket | 100% |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 10 paket | 3 Paket | 3 Paket | 100% | 4 Paket | 8 Paket | 100% |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 10 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 24 Laporan | 67% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|-------------|------------|------------|------|------------|------------|-----|
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 36 Laporan | 322 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 24 Laporan | 83% |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase fasilitasi pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit | N/A | 5 Unit | 6 Unit | 100% | 3 Unit | 9 Unit | 60% |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor | 100% | 160% | 100% | 67% | 67% | 100% | 100% | 33% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------|
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 0 Laporan | 12 Laporan | - | 0% | 12 Laporan | 12 Laporan | 33% |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 6 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 3 Laporan | 24 Laporan | 100% |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 24 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 24 Laporan | 100% |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD | 90% | 150% | 90% | 67% | 74% | 90% | 90% | 33% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------|--------------|--------|--------|------|--------|---------|------|
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 24 Unit | 10 Kendaraan | 8 Unit | 8 Unit | 100% | 8 Unit | 16 Unit | 100% |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 15 Unit | 5 Jenis | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 5 Unit | 8 Unit | 80% |
| 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | N/A | 1 Unit | - | 100% | 1 Unit | 1 Unit | 80% |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP | 81% | 100% | 81% | 0% | 0% | 81% | 81% | 33% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------|------------|--------|------|------------|------------|-----|
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 81% | 100% | 80% | 0% | 0% | 80% | 80% | 33% |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Laporan | 24 Laporan | 12 Laporan | - | 0% | 12 Laporan | 12 Laporan | 67% |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | 92% | 100% | 92% | 83,35% | 91% | 92% | 92% | 33% |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 86% | 200% | 86% | 86% | 100% | 86% | 86% | 86% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|------|--------------------------|---------------------------|------|
| 7.01.03.2.01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 40 Lembaga | 20 Lembaga Kemasyarakatan | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 6 Lembaga Kemasyarakatan | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 100% |
| 7.01.03.2.01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 0 | N/A | - | - | 0% | - | - | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|------|
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 24 Laporan | 12 Laporan | 3 Laporan | 100% | 3 Laporan | 6 Laporan | 81% |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | 90% | N/A | 90% | 0% | 0% | 90% | 90% | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-------------|---|----|-------------|-------------|-----|
| 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 60 Keluarga | 20 Lembaga | 20 Keluarga | - | 0% | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 55% |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-------------|---|----|-------------|-------------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|-------------|------------|-------------|---|----|-------------|-------------|-----|
| 7.01.03.2.06.02 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 60 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga | 60 Keluarga | 55% |
| 7.01.03.2.06.03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 60 Keluarga | 12 Laporan | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga | 60 Keluarga | 55% |
| 7.01.03.2.06.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | 2 Keluarga | 12 Laporan | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga | 60 Keluarga | 4% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|-----|-------------|------|----|-------------|-------------|-----|
| 7.01.03.2.06.05 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 2 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | 1,00 | 2% | 30 Keluarga | 60 Keluarga | 4% |
| 7.01.03.2.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 315 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | - | 0% | 60 Keluarga | 60 Keluarga | 55% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|-----|-------------|------|----|-------------|-------------|----|
| 7.01.03.2.06.07 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 2 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | 1,00 | 2% | 30 Keluarga | 60 Keluarga | 4% |
|-----------------|---|--|------------|-----|-------------|------|----|-------------|-------------|----|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|-----|-------------|------|----|-------------|-------------|-----|
| 7.01.03.2.06.08 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | 315 Keluarga | N/A | 20 Keluarga | - | 0% | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 55% |
| 7.01.03.2.06.09 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 2 Keluarga | N/A | 20 Keluarga | 1,00 | 2% | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 4% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--------------|-----|-------------|---|----|-------------|-------------|-----|
| 7.01.03.2.06.10 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 0 Keluarga | N/A | 0 Keluarga | - | 0% | 0 Keluarga | 0 Keluarga | 0% |
| 7.01.03.2.06.11 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | 0 Keluarga | N/A | 20 Keluarga | - | 0% | 20 Keluarga | 40 Keluarga | 0% |
| 7.01.03.2.06.12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 150 Keluarga | N/A | 30 Keluarga | - | 0% | 30 Keluarga | 60 Keluarga | 33% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|-----------|--------------|----|----|--------------|---------------|------|
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM' | Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 0% | 86% | 0% | 0% | 86% | 86% | 29% |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum | 1 Fasilitasi | 0 Laporan | 6 Fasilitasi | 0 | 0% | 6 Fasilitasi | 12 Fasilitasi | 100% |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 12 Laporan | 0 Laporan | 2 Laporan | - | 0% | 2 Laporan | 2 Laporan | 33% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|-----|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 86% | N/A | 86% | 100% | 116% | 86% | 100% | 39% |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 3 Fasilitasi | N/A | 4 Fasilitasi | 4 Fasilitasi | 100% | 4 Fasilitasi | 8 Fasilitasi | 100% |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 3 Dokumen | N/A | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 100% |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu | 80% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42% |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--------|-----|--------|--------|------|--------|---------|------|
| | | Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu | 80% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42% |
| | | Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu | 60% | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 56% |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu | 8 Desa | N/A | 8 Desa | 8 Desa | 143% | 8 Desa | 16 Desa | 104% |
| | | Jumlah Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu | 8 Desa | N/A | 8 Desa | 6 Desa | 86% | 8 Desa | 16 Desa | 88% |
| | | Jumlah Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu | 8 Desa | N/A | 8 Desa | 8 Desa | 167% | 8 Desa | 16 Desa | 122% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|------|------------|-------------|------|
| 7.01.06.201.0 1. | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 64 Dokumen | N/A | 64 Dokumen | 64 Dokumen | 260% | 64 Dokumen | 128 Dokumen | 153% |
| 7.01.06.201.0 2. | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 12 Dokumen | 8 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 260% | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 67% |
| 7.01.06.201.0 3. | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | 8 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 260% | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 67% |
| 7.01.06.201.0 4. | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 4 Laporan | N/A | 4 Laporan | 4 Laporan | 260% | 4 Laporan | 8 Laporan | 153% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----|
| 7.01.06.201.0 5. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 Dokumen | N/A | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 260% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 67% |
| 7.01.06.201.0 6. | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 0 Dokumen | N/A | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 260% | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 67% |
| 7.01.06.201.0 7. | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 Dokumen | N/A | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 260% | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 67% |
| 7.01.06.201.0 8. | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2 Dokumen | N/A | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 260% | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 67% |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----|
| 7.01.06.201.0 9. | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8 Dokumen | N/A | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 260% | 8 Dokumen | 16 Dokumen | 67% |
|---------------------|--|--|-----------|-----|-----------|-----------|------|-----------|------------|-----|

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tekung dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

Tabel 2.2

TC – 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan TekungKabupaten Lumajang

Perangkat Daerah :Kecamatan Tekung

| N O | Indikator Tujuan / Sasaran Renstra PD | SPM / standar nasional | IKK | Target P- Renstra PD | Target Renstra PD | | | Realisasi Capaian P- Renstra PD | Realisasi Capaian Renstra PD | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|--------|---|------------------------------|-----|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $10 = (9+6)/2$ | 11 | 12 | 13 |
| | Nilai IKM Kecamata n | N/A | N/A | 82,5 | 88,8 | N/A | N/A | 86,6 | N/A | N/A | N/A | Indeks Pelayan an Publik Tahun 2024 dan 2025 menjadi Indikato r Tujuan Kecama |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|--------|--------|------|------|--------|-----|------|------|--|-----|
| | | | | | | | | | | | | | tan |
| | IPP | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,6 | 66,6 | N/A | N/A | 64,6 | 66,6 | | |
| | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | N/A | N/A | 86,00% | 93,00% | 77% | 74% | 84,13% | N/A | 100% | 100% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------|--------|-----|-----|---------|-----|------|------|--|
| Rata - rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | N/A | N/A | 84,00% | 85,00% | 93% | 97% | 100,00% | N/A | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | |

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data –data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kembali dan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Menentukan batasan sasaran Kinerja yang akan diukur
2. Menentukan kapan pelaksanaan kinerja
3. Menentukan anggaran yang tepat agar pelaksanaan kinerja dapat berjalan dengan optimal

Tabel 2.3

**Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang**

| No | Indikator Kinerja | Jenis Data | Formulasi/Rumus Perhitungan | Teknik Pengumpulan Data | Teknik Monitoring dan Evaluasi |
|-----------|--------------------------|-------------------|---|--|---|
| 1 | Nilai IKM Kecamatan | Kuantitatif | <i>Survey Kepuasan Masyarakat</i> | Penghitungan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Lumajang atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survey secara berkala |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik | Kuantitatif | <i>Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan</i> | Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan |

| No | Indikator Kinerja | Jenis Data | Formulasi/Rumus Perhitungan | Teknik Pengumpulan Data | Teknik Monitoring dan Evaluasi |
|----|--|-------------|--|--|--|
| | | | <i>Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100</i> | terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | fasilitasi dan koordinasi secara berkala |
| 3 | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | Kuantitatif | <i>Penghitungan target kinerja sasaran adalah berdasarkan Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi dikalikan 100</i> | Data bersumber dari seluruh Seksi dan Subag terhadap kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi secara berkala |
| 4 | Rata – rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | Kuantitatif | <i>Penghitungan target kinerja sasaran adalah Jumlah desa yang meyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan dikalikan 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa (RKPDesa, APBDesa, LPPDesa) dikali 100</i> | Data bersumber dari Seksi Pemerintahan terhadap laporan desa yang telah diselesaikan. | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa secara berkala |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan dan isu strategis daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Masalah pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah Kecamatan Tekung yaitu Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Dari masalah pokok ini selanjutnya diidentifikasi masalah dan akar masalah untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Faktor Masalah

a) Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi

b. Akar Masalah

a) Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan

b) Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai

c) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa

d) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa

Tabel 2.4

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi | Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Belum Optimal Akuntabilitas pemerintahan desa belum optimal | Kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan Desa |

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

a. Faktor Kelemahan

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
4. Belum terpenuhinya penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*)
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;
6. Masih lemahnya koordinasi antar PD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
7. Kurang optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke Kecamatan terutama dari sisi Pengelolaan Anggaran;

8. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering kali berubah – ubah.

b. Faktor Ancaman

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas(shortcutting);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya;

Kesuksesan program strategis harus didukung sepenuhnya oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang. Khusus untuk PD Kecamatan mendukung Program Strategis Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan system online, tuntas di Kecamatan. Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan telah dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dapat langsung mendapatkan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan melalui kecamatan. Program ini akan terus dilaksanakan melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan seluruh kecamatan, melalui penempatan operator adminduk dari Dispenduk Capil di tiap kecamatan guna mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen adminduk.

Pada Tahun 2021 branding layanan administrasi kependudukan adalah tahun peningkatan layanan dengan memberikan penekanan kepada layanan yang semakin mudah, cepat dan aman. Tahun 2019, proses pencetakan E-KTP dilaksanakan di Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang. Kecamatan hanya sebagai perekaman saja. Untuk selanjutnya berkas pendukung dalam rangka pencetakan E-KTP dikirim ke Dispenduk Capil Lumajang untuk dilakukan pencetakan. Setelah tercetak, staf Kecamatan mengambil E-KTP tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada warga. Hal ini memerlukan waktu pelayanan lebih lama. Tahun 2020 sampai dengan sekarang, proses pencetakan dilakukan di Kecamatan Tekung, jika tidak ada kendala dengan data, pelayanan E-KTP tidak sampai 5 menit. Begitupun dengan Kartu Keluarga, tahun 2019 Kecamatan melakukan pencetakan di Kecamatan selanjutnya berkas dikirim ke Dispenduk untuk dilakukan penandatanganan. Namun Tahun 2020 sampai dengan saat ini, Cetak Kartu keluarga selesai di Kecamatan dan dapat ditunggu ditempat oleh warga.

Tabel 2.5
Data Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tekung

| NO | JENIS PELAYANAN | TAHUN | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Pelayanan Kartu Keluarga | 2792 | 2386 | 2270 | 3171 |
| 2 | Pelayanan Kartu Tanda Penduduk | 1690 | 413 | 150 | 396 |
| 3 | Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat | 767 | 554 | 561 | 446 |
| 4 | Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan | 92 | 19 | - | - |
| 5 | Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro | 5 | 8 | - | - |
| 6 | Pelayanan Surat Keterangan | 389 | 373 | 421 | 396 |
| 7 | Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan | - | - | - | - |
| Jumlah | | 6670 | 4909 | 4696 | 4409 |

c. Faktor – faktor Keberhasilan

1. Komitmen terhadap Rencana Program dan Kegiatan yang ada;
2. Bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan;
3. Melaksanakan penyelesaian SPJ dan program kegiatan sesuai rencana;
4. Disiplin kinerja Aparatur Sipil Negara;
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi yang memadai;
6. Tersedianya mekanisme proses pelayanan yang efektif;
7. Inisiatif, kreatif dan kerjasama tim;
8. Faktor kepemimpinan, aspek yang menjadi factor keberhasilan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung adalah motivasi, arahan dan bimbingan dari pemimpin serta pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Terdapat beberapa perubahan terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Tekung dalam pelaksanaan rencana kerja Tahun 2025. Penyebab perubahan tersebut antara lain perubahan kebijakan anggaran dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan rencana perubahan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 sebagai berikut.

Tabel 2.6

TC - 31

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lumajang**

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.01 | | | | | | Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Kecamatan Tekung | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | 100% | 1.974.427.057,00 | |
| 7.01.01.2.01 | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Tekung | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | 100% | 9.238.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.01 | | | | | | Penyusunan Dokumen Renja | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 3.500.000,00 | |
| 7.01.01.2.01.02 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 714.000 | |
| 7.01.01.2.01.03 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen | 1.464.000 | |
| 7.01.01.2.01.06 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 5 Laporan | 2.228.000,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Kinerja SKPD | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | |
| 7.01.01.2.01.07 | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Laporan | 1.332.000,00 | |
| 7.01.01.2.02 | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kecamatan Tekung | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 1.327.381.457,00 | |
| 7.01.01.2.02.01 | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kecamatan Tekung | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 13 Orang/12 Bulan | 1.299.566.457 | |
| 7.01.01.2.02.02 | | | | | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 24.300.000 | |
| 7.01.01.2.02.04 | | | | | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 12 Dokumen | 580.000 | |
| 7.01.01.2.02.05 | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 1.441.000 | |
| 7.01.01.1.02.06 | | | | | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang | 2 Dokumen | 702.000 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Tersusun | | | |
| 7.01.01. 1.02.06 | | | | | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan /semesteran SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulan/semesteran SKPD | 2 Dokumen | 792.000 | |
| 7.01.01. 2.03 | | | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kecamatan Tekung | Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | 100% | 2.331.000,00 | |
| 7.01.01. 2.03.01 | | | | | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | 1.234.000,00 | |
| 7.01.01. 2.03.05 | | | | | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Dokumen | 917.000 | |
| 7.01.01. 2.03.06 | | | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 180.000 | |
| 7.01.01. 2.06 | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kecamatan Tekung | persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah | 100% | 80.388.600,00 | |
| 7.01.01. 2.06.01 | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kecamatan Tekung | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2.500.000 | |
| 7.01.01. | | | | | | Penyediaan Bahan | Kecamatan | Jumlah Paket Bahan | 43 Paket | 27.516.600,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.06.04 | | | | | | Logistik Kantor | Tekung | Logistik Kantor yang Disediakan | | | |
| 7.01.01. 2.06.05 | | | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kecamatan Tekung | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 7 Paket | 10.352.000 | |
| 7.01.01. 2.06.06 | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kecamatan Tekung | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia | 13 Paket | - | |
| 7.01.01. 2.06.07 | | | | | | Penyediaan Bahan/Material | Kecamatan Tekung | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 Paket | 1.200.000 | |
| 7.01.01. 2.06.08 | | | | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 6.000.000 | |
| 7.01.01. 2.06.09 | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 32.820.000,00 | |
| 7.01.01. 2.07 | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kecamatan Tekung | Persentase fasilitas pengadaan BMD | 100% | 50.550.000,00 | |
| 7.01.01. 2.07.03 | | | | | | Pengadaan Alat Besar | Kecamatan Tekung | Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan | 1 Unit | - | |
| 7.01.01. 2.07.04 | | | | | | Pengadaan Alat Angkut Darat Tak Bermotor | Kecamatan Tekung | Jumlah Unit Alat Angkut Darat tak Bermotor | 1 Unit | - | |
| 7.01.01. 2.07.06 | | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Tekung | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 60 Unit | 50.550.000,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.01.2.07.08 | | | | | | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Kecamatan Tekung | Jumlah Unit Aset tak berwujud yang disediakan | 1 Unit | - | |
| 7.01.01.2.07.11 | | | | | | Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kecamatan Tekung | Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 10 Unit | - | |
| 7.01.01.2.08 | | | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Tekung | Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor | 100% | 187.677.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.01 | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 1.200.000,00 | |
| 7.01.01.2.08.02 | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 36.000.000 | |
| 7.01.01.2.08.03 | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersusun | 12 Laporan | - | |
| 7.01.01.2.08.04 | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 150.477.000,00 | |
| 7.01.01.2.09 | | | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kecamatan Tekung | Presentase Fasilitasi Pemeliharaan BMD | 100% | 46.550.000,00 | |
| 7.01.01. | | | | | | Penyediaan Jasa | Kecamatan | Jumlah Kendaraan Dinas | 5 Unit | 30.000.000,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.09.02 | | | | | | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tekung | Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | |
| 7.01.01. 2.09.06 | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kecamatan Tekung | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 21 Unit | 11.050.000,00 | |
| | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Kecamatan Tekung | | 1 Unit | 2.000.000,00 | |
| 7.01.01. 2.09.09 | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Tekung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | 3.500.000,00 | |
| 7.01.01. 2.09.10 | | | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kecamatan Tekung | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit | - | |
| 7.01.02 | | | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Kecamatan Tekung | persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP | 100% | 7.000.000,00 | |
| | | | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Kecamatan Tekung | | 100% | 4.400.000,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Kecamatan Tekung | | 100% | 4.400.000,00 | |
| 7.01.02.2.01 | | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Kecamatan Tekung | Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 100% | 2.600.000,00 | |
| | | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Kecamatan Tekung | | 100% | 2.600.000,00 | |
| 7.01.02.2.01.01 | | | | | | Koordinasi/ Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instalasi vertical terkait | Kecamatan Tekung | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 Laporan | - | |
| 7.01.02.2.01.02 | | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 2 Dokumen | - | |
| 7.01.03 | | | | | | Program | Kecamatan | rata-rata persentase | 100% | 177.837.750,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Tekung | fasilitasi pemberdayaan masyarakat | | | |
| 7.01.03.2.01 | | | | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Kecamatan Tekung | persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | 100% | 150.037.750,00 | |
| 7.01.03.2.01.01 | | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 6 Lembaga | 3.000.000,00 | |
| 7.01.03.2.01.02 | | | | | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 8.296.250,00 | |
| 7.01.03.2.01.03 | | | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 Laporan | 138.741.500,00 | |
| 7.01.03.2.06 | | | | | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan | Kecamatan Tekung | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | 100% | 27.800.000,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Kelurahan | | | | | |
| 7.01.03. 2.06.01 | | | | | | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 20 Keluarga | 20.325.000,00 | |
| 7.01.03. 2.06.02 | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat | 30 Keluarga | - | |
| 7.01.03. 2.06.03 | | | | | | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | 30 Keluarga | 1.275.000,00 | |
| 7.01.03. 2.06.04 | | | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang | 30 Keluarga | - | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | Sandang Produksi Dalam Negeri | | Produksi Dalam Negeri | | | |
| 7.01.03. 2.06.05 | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | 30 Keluarga | 450.000,00 | |
| 7.01.03. 2.06.06 | | | | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 30 Keluarga | 450.000,00 | |
| 7.01.03. 2.06.07 | | | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 25 Keluarga | 1.425.000,00 | |
| 7.01.03. 2.06.08 | | | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan | 20 Keluarga | - | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|---------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | |
| 7.01.03.2.06.09 | | | | | | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup | 20 Keluarga | - | |
| 7.01.03.2.01.01 | | | | | | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam | 20 Keluarga | 1.375.000,00 | |
| 7.01.03.2.02.2 | | | | | | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Kecamatan Tekung | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 50 Keluarga | 2.500.000,00 | |
| 7.01.04 | | | | | | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Candipuro | Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 100% | 12.725.000,00 | |
| 7.01.04.2.01 | | | | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Kecamatan Tekung | Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan | 2 Fasilitasi | 12.725.000,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | Ketertiban Umum | | | |
| 7.01.04. 2.01.01 | | | | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2 Laporan | 12.725.000,00 | |
| 7.01.04. 2.01.02 | | | | | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 Laporan | - | |
| 7.01.05 | | | | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Tekung | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 7.200.000,00 | |
| 7.01.05. 2.01 | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Kecamatan Tekung | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 4 Fasilitasi | 7.200.000,00 | |
| 7.01.05. 2.01.08 | | | | | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Dokumen | 7.200.000,00 | |
| 7.01.06 | | | | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Tekung | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | 100% | 65.548.250,00 | |
| | | | | | | | | Persentase Desa yang | 80% | | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|---|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | menetapkan APBDes Tepat Waktu | | | |
| | | | | | | | | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | 100% | | |
| 7.01.06.2.01 | | | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | 8 Desa | 65.548.250,00 | |
| | | | | | | | | Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | 8 Desa | | |
| | | | | | | | | Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | 8 Desa | | |
| 7.01.06.2.01.01 | | | | | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 64 Dokumen | 1.396.250,00 | |
| 7.01.06.2.01.02 | | | | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 4 Dokumen | 9.125.000,00 | |
| 7.01.06.2.01.03 | | | | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 Dokumen | 9.000.000,00 | |
| 7.01.06.2.01.04 | | | | | | Fasilitasi Penerapan dan penegakan | Kecamatan Tekung | Jumlah Laporan fasilitasi dalam rangka penerapan | 4 laporan | 3.600.000,00 | |

| KODE | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---------------------|-----------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|--|------------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | peraturan perundang - undangan | | dan penegakan peraturan perundang - undangan | | | |
| 7.01.06. 2.01.07 | | | | | | Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Badan Permusyawaratan Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Badan permusyawaratan desa | 1 Dokumen | 1.052.000,00 | |
| | | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | 6 Dokumen | 34.250.000,00 | |
| 7.01.06. 2.01.08 | | | | | | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | 2 Dokumen | 1.150.000,00 | |
| 7.01.06. 2.01.09 | | | | | | Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Kecamatan Tekung | Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | 8 Dokumen | 2.825.000,00 | |
| 7.01.06. 2.01.7 | | | | | | Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Kecamatan Tekung | Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | 12 Laporan | 2.000.000,00 | |
| JUMLAH | | | | | | | | | | 1.974.427.057,00 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu – isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan lokasinya kepada Kecamatan Tekung. Namun demikian, usulan – usulan tersebut tidak masuk dalam dokumen perencanaan Kecamatan Tekung. Usulan Musrenbang dari masyarakat melalui Desa, difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Tekung untuk selanjutnya direalisasikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu Kegiatan dimaksud. Dengan demikian, usulan program / kegiatan NIHIL untuk dokumen perencanaan Kecamatan Tekung sebagaimana tabel TC – 32.

2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Perangkat Daerah Kecamatan Tekung menghadirkan Inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun Inovasi tersebut adalah dengan :**CERIA (Cepat, Efektif dan Efisien Ramah, Ikhlas dan Akuntabel)**,Inovasi ini dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang.

CERIA (Cepat, Efektif dan Efisien Ramah, Ikhlas dan Akuntabel) adalah salah satu inovasi Kecamatan Tekung dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan dari kua sebagai pendukungnya selain itu pengembangan layanannya diperluas dibidang kesehatan dan ketertiban umum yang merupakan mitra layanan lintas sektor. Inovasi **CERIA (Cepat, Efektif dan Efisien Ramah, Ikhlas dan Akuntabel)**. Setelah itu CERIA ini juga dilaksanakan di desa – desa lain yang membutuhkan layanan prima guna memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kegiatan ini adalah terpadu karena dilaksanakan oleh pegawai / karyawan kecamatan dan lintas sector,Polsek,Koramil,KUA, Puskesmas Tekung, Kepala Desa, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat Desa guna bersama – sama membantu kesulitan dan pemberdayaan pada masyarakat setempat adapun yang ikut hadir pada pelaksanaan giat ini adalah petugas yang membidangi serta didampingi oleh Camat,Kapolsek,Danramil, KepalaPuskesmas,Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kepala KUA guna memastikan data pendukung administrasi kependudukan.

2.6.1. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Tekung adalah salah satu daerah di wilayah pinggiran kota Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis yang rata. Salah satunya karena ketidaktahuan mereka tentang pentingnya administrasi kependudukan, untuk masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik tidak bisa melakukan penerbitan dokumen, letak geografis desa-desa yang sangat luas dan mata pencaharian masyarakat banyak sebagai buruh petani atau sector informal lainnya sehingga kesulitan untuk menikmati pelayanan ke kantor kecamatan secara langsung untuk pengurusan dokumen. Selama ini masyarakat masih berpikir bahwa mengurus dokumen kependudukan itu sulit hanya apabila mereka dibantu oleh orang lain yang pada akhirnya orang tersebut meminta uang untuk pengurusan dokumen dan masyarakat masih beranggapan bahwasanya dokumen kependudukan ada biayanya oleh sebab itu

banyak dari warga yang menjadi calo/penjual jasa untuk mengurus administrasi kependudukan dengan harapan dapat memberikan tarif sesuai keinginannya. Sehingga masyarakat belum menyadari bahwa dokumen kependudukan sebenarnya mudah untuk menyelesaikan administrasinya. Masyarakat terkadang enggan untuk mengurus administrasi kependudukan yang menurut mereka masih sangat sulit, sehingga ada potensi calo/pungli yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan penjual jasa

2.6.2. Tujuan Kegiatan

- 1) Pemberian layanan prima terhadap masyarakat terutama masyarakat sangat membutuhkan;
- 2) Percepatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada layanan masyarakat;
- 3) Pemberdayaan layanan kesehatan pada masyarakat daerah terpencil

2.6.3. Manfaat

- 1) Menumbuh kembangkan rasa solidaritas dan kinerja pegawai yang tinggi di bidang pelayanan;
- 2) Memberikan percepatan layanan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan administrasi kependudukan pada masyarakat khususnya di daerah terpencil

2.6.4. Hasil inovasi

- 1) Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tekung pada Tribulan I Tahun 2023 yaitu 90,58, meningkat dari Nilai IKM Pada Tribulan IV Tahun 2022 yaitu 82,58 dan mengalami peningkatan sebesar 102%;
- 2) terselesaikannya layanan adminduk di Pedukuhan terpencil di wilayah Kecamatan Tekung, dan terpenuhinya layanan kesehatan primer dan terbiasanya masyarakat dengan pola hidup sehat.

2.6.5. Alur Inovasi Pelayanan

Struktur organisasi Inovasi CERIA adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Camat Tekung, yang bertugas :

- 1) Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 2) Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Inovasi Jemput Bola

b. Ketua

Ketua Tim Inovasi CERIA adalah Sekretaris Kecamatan Tekung, yang bertugas :

- 1) Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim termasuk melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dengan pelayanan CERIA yaitu Kepala Puskesmas Tekung, Kepala KUA Tekung, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Tekung yang terlibat dalam pelayanan Jemput Bola
- 2) Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim
- 3) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap laporan Pemberian dokumen kependudukan

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kasi Pelayanan Umum pada Kecamatan Tekung, yang bertugas :

- 1) Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan Inovasi CERIA
- 2) Menyusun laporan Pemberian Dokumen Kependudukan.

d. Anggota

Anggota terdiri dari :

- a. Unsur Puskesmas Tekung
- b. Unsur Puskesmas Penanggal
- c. Unsur Petugas KUA
- d. Unsur Koordinator Wilayah Pendidikan
- e. Unsur PKB
- f. Operator Kependudukan
- g. Staf bidang Pelayanan Umum,

dengan tugas :

- 1) Unsur Puskesmas Tekung dan Puskesmas Penanggal melakukan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah terpencil untuk

- mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kepada lansia dan ibu hamil dan juga melakukan sosialisasi tentang Ibu Hamil KEK karena usia pernikahan yang terlalu dini;
- 2) Unsur KUA melakukan tugas memberikan legalisasi pada surat nikah untuk pelayanan akte kelahiran dan memberikan pelayanan untuk warga yang akan mengajukan pendaftaran nikah;
 - 3) Unsur Pendidikan bekerjasama dengan Petugas KB memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada warga usia sekolah untuk melanjutkan sekolah sesuai dengan usianya sehingga meminimalisir usia putus sekolah di wilayah Kecamatan Tekung dan juga mengurangi angka pernikahan dini;
 - 4) Operator Kependudukan dan staf pelayanan bertugas :
 1. Menerima berkas permohonan masyarakat tentang Dokumen Kependudukan.
 2. Mengantarkan Dokumen Kependudukan sampai kerumah masyarakat.
- e. Alur dari proses Inovasi CERIA adalah sebagai berikut (Khusus untuk pengajuan dokumen kependudukan), untuk pelayanan kesehatan dan lainnya bisa dengan sistem sweeping atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkumpul di lokasi yang menjadi tujuan Tim) :
1. Masyarakat melengkapi berkas dokumen kependudukan dan dibawa ke lokasi yang menjadi tujuan tim CERIA;
 2. Petugas Pelayanan umum Kecamatan Tekung kroscek berkas dan memverifikasi berkas dari masyarakat yang mengajukan;
 3. Petugas Pelayanan umum Kecamatan Tekung memproses Dokumen dan diajukan TTE (Tanda tangan elektronik) ke Dispenduk Kabupaten Lumajang;
 4. Petugas Pelayanan Kecamatan Tekung melakukan register dokumen kependudukan;
 5. Petugas Inovasi CERIA berkunjung kerumah masyarakat dengan membawa dokumen kependudukan untuk diserahkan langsung kepada yang bersangkutan antara lain :

- a. Kartu Keluarga
- b. Kartu Identitas Anak
- c. Akta Kematian beserta Santunan Kematian
- d. E – KTP
- e. Akta Kelahiran

2.6.6. Kendala Pelaksanaan Inovasi

Setelah dilakukan inovasi CERIA terdapat beberapa masalah antara lain :

1. Inovasi CERIA tidak disertai dengan dukungan Anggaran, sehingga tim secara sukarela menanggung Akomodasi untuk mengantarkan dokumen administrasi kependudukan kepada Masyarakat yang pada akhirnya dilakukan hanya sesuai kebutuhan.
2. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mengetahui akan inovasi ini;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang pemerintahan umum berdasarkan karakteristik kewilayahan. Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

3.1.1. Program Prioritas Nasional

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

3.1.2. Program Prioritas Provinsi

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur

3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai – nilai budaya lokal
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

3.1.3. Program Prioritas Kabupaten Lumajang

1. Penguatan ekonomi peningkatan sektor pertanian, perindustrian dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
4. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar
5. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
6. Peningkatan konduktivitas wilayah serta kualitas pelayanan publik

3.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 dan berdasarkan penjabaran tujuan Kantor Kecamatan Tekung yaitu Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Arah Kebijakan PDK Kecamatan Tekung antara lain :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Meningkatkan upaya penanganan konflik sosial
3. Revitalisasi Lembaga kemasyarakatan desa
4. Meningkatkan pemberdayaan perempuan
5. Meningkatkan pelayanan publik yang responsive dan berdaya saing

Meningkatkan transparansi pemerintahan Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah, dalam hal ini PD Kecamatan Tekung secara teknis mengampu kewilayahan. Sehubungan dengan hal tersebut, PD Kecamatan Tekung mendukung program kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ke tujuh yaitu Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan pelayanan publik untuk kemudahan investasi. Dukungan tersebut Nampak dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan PD Kecamatan Tekung Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut telah dilaksanakan inovasi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menunjukkan keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan dalam Survey Kepuasan Masyarakat. Dalam hal ini, hasil SKM PD Kecamatan Tekung Tahun 2023 pada Triwulan III menunjukkan nilai 89,44 atau SANGAT BAIK.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan arah kebijakan Pembangunan di Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan pembangunan Kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Tekung untuk tiga tahun ke depan menetapkan tujuan yakni ***Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi.*** Dengan target dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.1
Indikator Tujuan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Rumus Penghitungan | Target Kinerja Tujuan |
|----|--------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--------------|
| 1 | <i>Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi</i> | Indeks Pelayanan Publik | <i>Hasil penghitungan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten</i> | 59,43 (C) |
|---|---|-------------------------|---|--------------|

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tekung selama kurun waktu tiga tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Tekung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan .

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Pemerintahan yang baik ditetapkan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2

Indikator Sasaran Perangkat Daerah

| NO | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | RUMUS PENGHITUNGAN | TAHUN 2024 |
|----|--|--|---|------------|
| 1 | Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan | Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti | $\frac{\text{Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi}} \times 100\%$ | 83,6% |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa | Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | $\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBdesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$ | 93% |

3.2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun Strategi Kecamatan Tekung adalah : *Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi*

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Arah Kebijakan Kecamatan Tekung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Revitalisasi lembaga kemasyarakatan desa;
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
4. Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing;
5. Meningkatkan transparansi pemerintahan.

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Tekung yaitu bertujuan Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dengan sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan juga Meningkatnya akuntabilitas pemerintah desa. Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Tekung diarahkan untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 – 2026. Guna mewujudkan strategi yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan

indikatif untuk memperlancar mewujudkan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 - a. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - a. Pelaksanaan Urusan Pelimpahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Tekung dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kewenangan perangkat daerah kecamatan maka dapat disusun program dan kegiatan Kecamatan Tekung. Terdapat 6 program dan 13 kegiatan yang menjadi landasan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Kecamatan Tekung. Program dan kegiatan dimaksud beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada Tabel T-C.33 sebagai berikut.

Tabel 3.3

TC – 33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Lumajang**

Nama Perangkat : Kecamatan Tekung

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Sasaran /Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | FORMULASI | Aktivitas | Skala Prioritas | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|---------|---|--|---|---|-----------|-----------------|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan | | | | 100 % | 1.667.377.457 | DAU | | 100 % | 1.831.641.403 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--------------------------|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| | | | | dikali 100 | | | | | | | | | |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terfasilitasinya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | (Jumlah Fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja) x 100% | | | | 100 % | 11.237.000 | DA U | | 100 % | 11.039.700 |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 3 Dokumen | 3.168.000 | DA U | | 2 Dokumen | 2.433.200 |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Renja | 1 | | | 1.256.000 | | | | 1.381.600 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|---|---|------------------|-----------|------------------|-----|--|-----------|------------------|
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perubahan Renja | 2 | | | 956.000 | | | | 1.051.600 |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Renstra | 3 | | | 956.000 | | | | 1.051.600 |
| 7.01.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 1 Dokumen | 1.331.000 | DAU | | 1 Dokumen | 1.464.100 |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | 1 | | | 1.331.000 | | | | 1.464.100 |
| 7.01.01.2.01.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 2 Dokumen | 2.662.000 | DAU | | 1 Dokumen | 1.600.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|------------------|-----------|------------------|-----|--|-----------|-----------|
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan | 1 | | | 1.331.000 | | | | 1.464.100 |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pergeseran | 2 | | | 1.331.000 | | | | 1.464.100 |
| 7.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kecamatan Tekung | 5 Laporan | 2.492.000 | DAU | | 5 Laporan | 3.800.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|---|--|--|--|---|------------------|------------|------------------|--|--|------------|------------------|
| | | | | | Penyusunan laporan LKJ | 1 | | | 1.540.000 | | | | 1.694.000 |
| | | | | | Penyusunan Dokumen LKJ Tribulan | 2 | | | 952.000 | | | | 1.047.200 |
| 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 12 Laporan | 1.584.000 | | | 12 Laporan | 1.742.400 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Evaluasi Renja TW. IV | 1 | | | 656.000 | | | | 721.600 |
| | | | | | Penyusunan Laporan IKM | 2 | | | 928.000 | | | | 1.020.800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| 7.01.01.2 .02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administras i Keuangan Perangkat Daerah | (Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi)/(Juml ah Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dipenuhi) x 100% | | | | 100 % | 1.325.914.457 | DA U | | 100 % | 1.457.353.10 3 |
| 7.01.01.2. 02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang terlayani Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | | Keca matan Tekun g | 11 Oran g/12 Bula n | 1.299.566.457 | DA U | | 13 Oran g/12 Bula n | 1.429.523.103 |
| | | | | | Pembayar an Gaji dan Tunjanga n serta Tambaha n Penghasil an PNS | 1 | | | 1.299.566.457 | | | | 1.429.523.103 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------|
| 7.01.01.2. 02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun | | | Keca matan Tekun g | 12 Dok ume n | 24.300.000 | DA U | 12 Dok ume n | 26.730.000 |
| | | | | | Honorariu m Pengguna Anggaran | 1 | Keca matan Tekun g | | 6.708.000 | | | 7.378.800 |
| | | | | | Honorariu m Bendahar a Pengeluar an | 2 | Keca matan Tekun g | | 5.916.000 | | | 6.507.600 |
| | | | | | Honorariu m Verifikato r SKPD | 3 | Keca matan Tekun g | | 5.940.000 | | | 6.534.000 |
| | | | | | Honorariu m PPTK | 4 | Keca matan Tekun g | | 5.736.000 | | | 6.309.600 |
| 7.01.01.2. 02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun | | | Keca matan Tekun g | 12 Dok ume n | 208.000 | DA U | 12 Dok ume n | 228.800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|-------------------|-----------|----------------|------|--|-----------|---------|
| | | | | | Penyusunan Dokumen Akuntansi SKPD / Laporan Bulanan | 1 | | | 208.000 | | | | 228.800 |
| 7.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun | | | Kecamatan Tekun g | 1 Laporan | 792.000 | DA U | | 5 Laporan | 871.200 |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 | 1 | | | 792.000 | | | | 871.200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|---|------------------|------------|----------------|------|--|------------|---------|
| 7.01.01.1. 02.06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Tersusun | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 2 Dokumen | 532.000 | DA U | | 2 Dokumen | 585.200 |
| | | | | | Penyusunan Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan Inspektorat dan BPK | 1 | | | 532.000 | | | | 585.200 |
| 7.01.01.1. 02.07 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan /semesteran SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 12 Laporan | 516.000 | DA U | | 12 Dokumen | 567.600 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|---|---|------------------|--------------|------------------|-------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | Penyusunan Laporan Prognosis / Semesteran | 1 | | | 516.000 | | | | 567.600 |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah | Persentase fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah | (Jumlah Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitas Administrasi BMD Perangkat Daerah yang harus dipenuhi) x 100% | | | | 100 % | 2.404.000 | DA U | | 100 % | 2.644.400 |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 2 Dokumen | 1.552.000 | DA U | | 2 Dokumen | 1.707.200 |
| | | | | | Fasilitas Penyusunan Dokumen RKBMD | 1 | | | 776.000 | | | | 853.600 |
| | | | | | Fasilitas Penyusunan Dokumen | 2 | | | 776.000 | | | | 853.600 |

| | | | | | RKBMD Perubaha n | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|---|---|-----------------------------|-------------------|----------------|---------|--|----------------------|---------|
| 7.01.01.2. 03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun | | | Keca matan Tekun g | 2 Lapo ran | 344.000 | DA U | | 2 Dok ume n | 378.400 |
| | | | | | Fasilitasi Laporan Rekonsilia si Barang Milik Daerah | 1 | | | 344.000 | | | | 378.400 |
| 7.01.01.2. 03.06 | Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun | | | Keca matan Tekun g | 12 Lapo ran | 508.000 | DA U | | 12 Lapo ran | 558.800 |
| | | | | | Fasilitasi Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah | 1 | | | 508.000 | | | | 558.800 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|---|------------------------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------|--|--------------|------------|
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah | (Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di rencanakan x100% | | | | 100 % | 76.653.000 | DA U | | 100 % | 84.318.300 |
| 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | | | Kecamatan Tekun g | 2 Paket | 2.107.600 | DA U | | 2 Paket | 2.318.360 |
| | | | | | Penyediaan Instalasi Listrik | 1 | | | 828.200 | | | | |
| | | | | | Penyediaan Alat Listrik/penerangan | 2 | | | 1.279.400 | | | | |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | | | Kecamatan Tekun g | 4 Paket | 24.915.400 | DA U | | 5 Paket | 27.406.940 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---------------------------------|---|------------------|---------|------------------|-----|--|---------|------------|
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1 | | | 11.689.500 | | | | 12.858.450 |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Kebersihan | 3 | | | 706.600 | | | | 777.260 |
| | | | | | Penyediaan Bahan Pembersih | 4 | | | 1.166.000 | | | | 1.282.600 |
| | | | | | Penyediaan Kertas dan Cover | 2 | | | 11.353.300 | | | | 12.488.630 |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia | | | Kecamatan Tekung | 7 Paket | 5.430.000 | DAU | | 7 Paket | 5.973.000 |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan | 1 | | | 4.880.000 | | | | 5.368.000 |
| | | | | | penggandaan | 2 | | | 550.000 | | | | 605.000 |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan / Material | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang tersedia | | | Kecamatan Tekung | 1 Paket | 1.600.000 | DAU | | 1 Paket | 1.760.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|---|------------------|------------|-------------------|-----|--|------------|------------|
| | | | | | Pembelian bahan bakar untuk solar genset | 1 | | | 1.600.000 | | | | 1.760.000 |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 12 Laporan | 2.000.000 | DAU | | 12 Laporan | 2.200.000 |
| | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | | | 2.000.000 | | | | 2.200.000 |
| 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun | | | Kecamatan Tekung | 12 Laporan | 40.600.000 | DAU | | 12 Laporan | 44.660.000 |
| | | | | | Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi | 2 | | | 10.650.000 | | | | 11.715.000 |
| | | | | | Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 1 | | | 21.750.000 | | | | 23.925.000 |
| | | | | | Fasilitasi Perjalanan Dinas | 3 | | | 8.200.000 | | | | 9.020.000 |

| | | | | | Luar Daerah | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--------------------|---|------------------|---------|------------|------|-----|---------|------------|
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Fasilitas Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase fasilitas pengadaan BMD | (Jumlah Fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi) x 100% | | | | 100 % | 14.000.000 | DA U | | 100 % | 15.400.000 |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia | | | Kecamatan Tekung | 27 Unit | 14.000.000 | DA U | | 42 Unit | 15.400.000 |
| | | | | | Pengadaan Komputer | 1 | | 1 unit | 10.000.000 | | | | 11.000.000 |
| | | | | | Pengadaan Printer | 2 | | 1 unit | 4.000.000 | | | | 4.400.000 |
| | | | | | Pengadaan | 4 | | 0 | | | FLP | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---------------------------------------|---|------------------|--------|---|--|-----|--------|---|
| | | | | | n AC Pelayanan | | | unit | - | | D | | - |
| | | | | | Pengadaan Kipas Angin Ruang Pertemuan | 5 | | 0 unit | - | | | | - |
| | | | | | Pengadaan Proyektor | 3 | | 0 unit | - | | | | - |
| 7.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | | | Kecamatan Tekung | 2 Unit | - | | DAU | 6 Unit | - |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 | 1 | | | - | | | | - |
| 7.01.01.1.07.02 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|------------------------|---|-------------------|--------------|--------------------|-------------|--|--------------|--------------------|
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor | (Jumlah Fasilitas Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitas Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi)x 100% | | | | 100 % | 207.312.000 | DA U | | 100 % | 228.043.200 |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersusun | | | Kecamatan Tekun g | 12 Laporan | - | DA U | | 12 Laporan | - |
| | | | | | Perjalanan Dinas Kurir | 1 | | | | | | | - |
| 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersusun | | | Kecamatan Tekun g | 12 Laporan | 36.000.000 | DA U | | 12 Laporan | 39.600.000 |
| | | | | | Pembayaran | 1 | | | 21.600.000 | | | | 23.760.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|--|--|--|---|------------------|------------|--------------------|------|--|------------|-------------|
| | | | | | Rekening Listrik | | | | | | | | |
| | | | | | Pembayaran Rekening Internet | 2 | | | 14.400.000 | | | | 15.840.000 |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | Kecamatan Tekung | 12 Laporan | 171.312.000 | DA U | | 12 Laporan | 188.443.200 |
| | | | | | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan | 1 | | | 159.600.000 | | | | 175.560.000 |
| | | | | | Pembayaran BPJS kesehatan Bagi Non ASN | 2 | | | 10.560.000 | | | | 11.616.000 |
| | | | | | Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Non ASN | 3 | | | 1.152.000 | | | | 1.267.200 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|---|----------------------------------|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|--|--------------|------------|
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD | (Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100% | | | | 100 % | 29.857.000 | DA U | | 100 % | 32.842.700 |
| 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksanya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarkannya Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | Kecamatan Tekung | 5 Unit | 24.257.000 | DA U | | 5 Unit | 26.682.700 |
| | | | | | BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 4 | 1 | | | 18.826.000 | | | | 20.708.600 |
| | | | | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | 2 | | | 4.563.000 | | | | 5.019.300 |
| | | | | | Pembayaran pajak Roda 2 | 3 | | | 868.000 | | | | 954.800 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|--|--------------------------|---|-----------------------------|------------|------------------|---------|--|------------|-----------|
| | | | | | dan Roda 4 | | | | | | | | |
| 7.01.01.1. 09.03. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Terlaksana pemeliharaan Alat Besar Yang dan dibayarkan perizinannya | Jumlah Unit Alat Besar Yang dipelihara yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Jumlah Unit Alat Besar Yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | | | | 1 Unit | - | | | 1 Unit | - |
| | | | | | Pemeliharaan genset | 1 | | | - | | | | |
| 7.01.01.2. 09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | Keca matan Tekun g | 21 Unit | 5.600.000 | DA U | | 21 Unit | 6.160.000 |
| | | | | | Pemeliharaan Printer | 2 | | 5 | 1.300.000 | | | | 1.430.000 |
| | | | | | Pemeliharaan Komputer | 1 | | 5 | 1.400.000 | | | | 1.540.000 |
| | | | | | Pemeliharaan Laptop | 3 | | 4 | 1.400.000 | | | | 1.540.000 |
| | | | | | Pemeliharaan AC | 4 | | 3 | 1.500.000 | | | | 1.650.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|---|---|---------------------|---|--|--------------|------------------|-------------|--|--------------|-----------|
| 7.01.01.2 09.09. | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksana pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 1 | | 7 Unit | - | | | 19 Unit | - |
| | | | | | Pemeliharaan Gedung | 1 | | | - | | | | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP | Presentase Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP | (Jumlah Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP terpenuhi/Jumlah Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP yang harus dipenuhi)*100% | | | | 100 % | 1.130.000 | DA U | | 100 % | 1.243.000 |
| 7.01.02.2 .01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | (Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang terpenuhi)/(Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan | | | | 100 % | 1.130.000 | DA U | | 100 % | 1.243.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|---|---|-------------------|------------|------------------|------|-------|------------|-----------|
| | | | | Pemerintahan di Kecamatan yang harus dipenuhi) *100% | | | | | | | | | |
| 7.01.02.2.01.01 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tersusunTerkait | | | Kecamatan Tekun g | 2 Lapo ran | 1.130.000 | DA U | | 2 Lapo ran | 1.243.000 |
| | | | | | Pembinaa n perangkat desa terkait pelayanan di desa | 1 | | | 630.000 | | FLP D | | 693.000 |
| | | | | | Monitorin g dan evaluasi pelayanan di desa | 2 | | | 500.000 | | | | 550.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|---|---|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------|--|-------------------|----------|
| 7.01.02.2 .04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah n yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum yang direncanakan x 100 % | | | | 100 % | - | DA U | | 100 % | - |
| 7.01.02.2. 04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | Keca matan Tekun g | 12 Lapo ran | - | DA U | | 12 Lapo ran | - |
| | | | | | Sosialisas i Pelayanan , | 1 | | | | - | | | - |
| | | | | | Jemput Bola terkait KK dan KTP | 2 | | | | - | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------------|-------------------|-----------------|--|------------------|------------|
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2 | | | | 100 % | 36.830.600 | DA U | | 100 % | 40.513.660 |
| 7.01.03.2 .01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang direncanakan dikali 100 | | | | 100 % | 24.830.600 | DA U | | 100 % | 27.313.660 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|--|---|------------------|-----------|------------------|-----|--|-----------|------------|
| 7.01.03.2. 01.01 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | Kecamatan Tekung | 6 Lembaga | 3.900.000 | DAU | | 6 Lembaga | 4.290.000 |
| | | | | | Fasilitasi Rapat Forum Musyawarah pembangunan desa | 2 | Kecamatan Tekung | | 2.400.000 | | | | 2.640.000 |
| | | | | | Monitoring Musrenbangdes | 1 | | | 1.500.000 | | | | 1.650.000 |
| 7.01.03.2. 01.02 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | Kecamatan Tekung | 1 Dokumen | 9.380.600 | DAU | | 3 Dokumen | 10.318.660 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|--|---|------------------|-----------|-------------------|-----|-----------|------------|
| | | | Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | |
| | | | | | Fasilitasi Rapat Pelaksanaan Musrenbang RKPD kecamatan | 1 | | | 9.380.600 | | | 10.318.660 |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang tersusun | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | Kecamatan Tekung | 5 Laporan | 11.550.000 | DAU | 8 Laporan | 12.705.000 |
| | | | | | Fasilitasi Paskibraka | 1 | | | 11.550.000 | | FLPD | 12.705.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|-------------------------------|---|-------------------------|--------------|-------------------|------------|------|--------------|-------------------|
| | | | | | Fasilitas Posyandu Gerbangmas | 5 | | | - | | FLPD | | - |
| | | | | | Fasiliatsi Popkab | 2 | | | - | | FLPD | | - |
| | | | | | Fasilitas Lumajang Mbiyen | 3 | | | - | | FLPD | | - |
| | | | | | Fasilitas MTQ | 4 | | | - | | FLPD | | - |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Terlaksananya Fasilitas Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100 % | | | Kecamatan Tekung | 100 % | 12.000.000 | DAU | | 100 % | 13.200.000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|----------------|---------|--------------------|---------|
| 7.01.03.2. 01.06.03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | Keca matan Tekun g | 30 Kelu arga | 885.000 | DA U | 30 Kelu arga | 973.500 |
| | | | | | Monev Pawon Urip | 1 | | | 885.000 | | | 973.500 |
| 7.01.03.2. 01.06.05 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | | | Keca matan Tekun g | 30 Kelu arga | - | DA U | 30 Kelu arga | - |
| | | | | | Sosialisas i Rumah Layak Huni | 1 | | | - | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---|--|---|--|---|-------------------|-------------|---|------|--|-------------|---|
| 7.01.03.2. 01.06.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | Kecamatan Tekun g | 30 Keluarga | - | DA U | | 30 Keluarga | - |
| | | | | | Sosialisasi GALERI PELANGI (Gerakan Keluarga Indonesia Dalam Peningkatan Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi) | 1 | | | - | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|--|---|------------------|-------------|---|-----|--|-------------|---|
| 7.01.03.2. 06.07 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | Kecamatan Tekung | 25 Keluarga | - | DAU | | 25 Keluarga | - |
| | | | | | Sosialisasi gerakan sigap stunting ibu baduta terdampingi (gessit) untuk bumil KEK | 1 | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|--------------------------------|---|------------------|-------------|---|-----|--|-------------|---|
| 7.01.03.2 06.11. | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | | | 20 Keluarga | | | | 20 Keluarga | - |
| | | | | | Sosialisasi Undang-undang KDRT | 1 | | | | | | | - |
| 7.01.03.2 06.12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | Kecamatan Tekung | 30 Keluarga | - | DAU | | 30 Keluarga | - |
| | | | | | Stunting | 1 | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|------------------|-------------|---|------|--|-------------|---|
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM' | Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 % | | | | 100 % | - | DA U | | 100 % | - |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Fasilitas Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum | Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | | | | 2 Fasilitas | - | DA U | | 2 Fasilitas | - |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | Kecamatan Tekung | 1 Laporan | - | DA U | | 2 Laporan | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|------------------------|---|--|--------------|------------------|-------------|------|--------------|-----------|
| | Kecamatan | | dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | | | | | Pembinaan untuk Linmas | 1 | | - | | | FLPD | | - |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 % | | | | 100 % | 3.600.000 | DA U | | 100 % | 3.960.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|---|--|---|-------------------|--------------|------------|-----|--|-------------|------------|
| 7.01.05.2 .01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan | | | | 12 Fasilitas | 3.600.000 | DAU | | 4 Fasilitas | 3.960.000 |
| 7.01.05.2. 01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Yang tersusun | | | Kecamatan Tekun g | 12 Dokumen | 3.600.000 | DAU | | 12 Dokumen | 3.960.000 |
| | | | | | Monitoring Wilayah terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | 1 | | | 3.600.000 | | | | 3.960.000 |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | (Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu / Jumlah Desa keseluruhan)*100% | | | | 100 % | 29.513.440 | DAU | | 100 % | 32.464.784 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|---|--|--|--|--------------|-------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| | | | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | (Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu /Jumlah Desa keseluruhan)*100% | | | | 100 % | | | | 90% | |
| | | | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | (Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu /Jumlah Desa keseluruhan)*100% | | | | 100 % | | | | 100 % | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan | | | | 100 % | 29.513.440 | DA U | | 100 % | 32.464.784 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------|---------|----------|-----------------------|-----------|
| 7.01.06.2. 01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | Keca matan Tekun g | 64 Dok ume n | 3.600.000 | DA U | | 64 Dok ume n | 3.960.000 |
| | | | | | Penyusun an Perdes dan Perkades | 1 | | | 3.600.000 | | | | 3.960.000 |
| 7.01.06.2. 01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintah an Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | Keca matan Tekun g | 4 Dok ume n | 7.200.000 | DA U | | 4 Dok ume n | 7.920.000 |
| | | | | | Pembinaa n dan pengawas an Terpadu | 2 | | | 7.200.000 | | FLP D | | 7.920.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|---|------------------|------------|---|--|------|------------|---|
| | | | | | Pembinaan perangkat desa terkait administrasi pemerintahan di desa | 1 | | | - | | FLPD | | - |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | Kecamatan Tekung | 12 Dokumen | - | | DAU | 12 Dokumen | - |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan desa | 1 | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|---|---|------------------|-----------|------------------|------|-----------|-----------|
| 7.01.06.2. 01.04 | Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan | Tersusunnya Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan | Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | | Kecamatan Tekung | 4 Laporan | 8.400.000 | DA U | 4 laporan | 9.240.000 |
| | | | | | Monev PBB | 1 | | | 8.400.000 | | | 9.240.000 |
| 7.01.06.2. 01.05 | Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen fasilitas dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | Kecamatan Tekung | 1 Dokumen | - | DA U | 1 Dokumen | - |
| | | | | | Fasilitasi pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---|--|--------------------------|---|------------------|-----------|------------------|---|------|-----------|-----------|
| 7.01.06.2 01.06. | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tersusun | | | 6 Dokumen | | - | | | | - |
| | | | | | Fasilitasi Pilkades | 1 | | | | | FLPD | | - |
| 7.01.06.2. 01.07 | Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Badan Permusyawaratan Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | Kecamatan Tekung | 1 Dokumen | - | | DAU | 1 Dokumen | - |
| | | | | | Fasilitasi pembinaan BPD | 2 | | | | - | | | - |
| 7.01.06.2. 01.08 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | Kecamatan Tekung | 2 Dokumen | 1.800.000 | | DAU | | 1.980.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|---|---|------------------|------------|------------------|-----|--|------------|------------------|
| | | | | | Sosialisasi dan Konsultasi Pemberhentian / Pengangkatan Prangkat desa | 1 | | | 1.800.000 | | | | 1.980.000 |
| 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | Kecamatan Tekung | 8 Dokumen | 4.500.000 | DAU | | 8 Dokumen | 4.950.000 |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan RKPDes | 1 | | | 4.500.000 | | | | 4.950.000 |
| 7.01.06.2.01.7 | Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya | Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | Kecamatan Tekung | 12 Laporan | 4.013.440 | DAU | | 12 Laporan | 4.414.784 |
| | | | | | Rapat Koordinasi pendamping desa | 1 | | | 4.013.440 | | | | 4.414.784 |

| | | | | |
|---------------|----------------------|--|--|----------------------|
| JUMLAH | 1.738.451.497 | | | 1.909.822.847 |
|---------------|----------------------|--|--|----------------------|

1.974.427.071

(235.975.574)

Tekung, Mei 2024

CAMAT TEKUNG

SARJITO WIBOWO, S.STP

NIP. 19830621 20012 001

Catatan :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada RenstraKecamatan Tekung memiliki 6 (enam) program yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 1 (satu) program kesekretariatan dan 5 (lima) program teknis. Program kesekretariatan memiliki 7 (Tujuh) kegiatan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan dan program teknis memiliki 7 (tujuh) kegiatan dan 26 (Dua puluh enam) sub kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan

Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Tahun 2025

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sasaran /Program /Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | FORMULASI | Aktivitas | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | |
|--------------|--|--|---|--|-----------|------------------------------------|-------------|
| | | | | | | Kebutuhan Dana | Sumber Dana |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 8 | 9 |
| 7.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terselenggara fasilitasi kebutuhan operasional kantor | Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran | Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi dibagi Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan dikali 100 | | 1.667.377.457 | DAU |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | (Jumlah Fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja) x | | 11.237.000 | DAU |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|---|------------------|---------|
| | | | | 100% | | | |
| 7.01.01 .2.01.0 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun | | 3.168.000 | DA U |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Renja | 1.256.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perubahan Renja | 956.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Renstra | 956.000 | |
| 7.01.01 .2.01.0 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun | | 1.331.000 | DA U |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) | 1.331.000 | |
| 7.01.01 .2.01.0 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan | | 2.662.000 | DA U |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|------------------|---------|
| | | RKA-SKPD | an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD | RKA-SKPD yang tersusun | | | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan | 1.331.000 | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pergeseran | 1.331.000 | |
| 7.01.01 .2.01.0 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 2.492.000 | DA U |
| | | | | | Penyusunan laporan LKJ | 1.540.000 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen LKJ Tribula n | 952.000 | |
| 7.01.01 .2.01.0 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang | | 1.584.000 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---|--|--|----------------------|------------|
| | | | | tersusun yang tersusun | | | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Evaluasi Renja TW. IV | 656.000 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan IKM | 928.000 | |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | (Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dipenuhi) x 100% | | 1.325.914.457 | DAU |
| 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang terlayani Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | | 1.299.566.457 | DAU |
| | | | | | Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan PNS | 1.299.566.457 | |
| 7.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun | | 24.300.000 | DAU |
| | | | | | Honorarium Pengguna Anggaran | 6.708.000 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|---|----------------|---------|
| | | | | | Honora rium Bendah ara Pengelu aran | 5.916.000 | |
| | | | | | Honora rium Verifika tor SKPD | 5.940.000 | |
| | | | | | Honora rium PPTK | 5.736.000 | |
| 7.01.01 .2.02.0 4 | Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD | Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksana an Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun | | 208.000 | DA U |
| | | | | | Penyusun an Dokum en Akunta nsi SKPD / Lapora n Bulana n | 208.000 | |
| 7.01.01 .2.02.0 5 | Koordinasi dan Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun | | 792.000 | DA U |
| | | | | | Penyusun an Lapora n Keuang an Akhir Tahun Perang kat Daerah Tahun Anggar an 2023 | 792.000 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|------------------|-----------------|
| 7.01.01 .1.02.0 6 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang Tersusun | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang tersusun | | 532.000 | DA U |
| | | | | | Penyusunan Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan Inspektorat dan BPK | 532.000 | |
| 7.01.01 .1.02.0 7 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD | Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD yang tersusun | | 516.000 | DA U |
| | | | | | Penyusunan Laporan Prognosis / Semesteran | 516.000 | |
| 7.01.0 1.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah | (Jumlah Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang harus dipenuhi) x 100% | | 2.404.000 | DA U |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|------------------|---------|
| 7.01.01 .2.03.0 1 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun | | 1.552.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKBM D | 776.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKBM D Perubahan | 776.000 | |
| 7.01.01 .2.03.0 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun | | 344.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah | 344.000 | |
| 7.01.01 .2.03.0 6 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun | | 508.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 508.000 | |
| | | | | | | | |

| 7.01.0 1.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum Perangkat Daerah | (Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di rencanakan x100% | | 76.653.000 | DA U |
|-------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|------------|---------|
| 7.01.01 .2.06.0 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | | 2.107.600 | DA U |
| | | | | | Penyediaan Instalasi Listrik | 828.200 | |
| | | | | | Penyediaan Alat Listrik/penerangan | 1.279.400 | |
| 7.01.01 .2.06.0 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | | 24.915.400 | DA U |
| | | | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 11.689.500 | |
| | | | | | Penyediaan Peralatan Kebersihan | 706.600 | |
| | | | | | Penyediaan Bahan Pembersih | 1.166.000 | |
| | | | | | Penyediaan Kertas dan Cover | 11.353.300 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|--|-------------------|---------|
| 7.01.01 .2.06.0 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia | | 5.430.000 | DA U |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan | 4.880.000 | |
| | | | | | penggandaan | 550.000 | |
| 7.01.01 .2.06.0 7 | Penyediaan Bahan / Material | Tersedianya Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jumlah Paket Bahan/Material yang tersedia | | 1.600.000 | DA U |
| | | | | | Pembelian bahan bakar untuk solar genset | 1.600.000 | |
| 7.01.01 .2.06.0 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersusun | | 2.000.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.000.000 | |
| 7.01.01 .2.06.0 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersusunnya Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersusun | | 40.600.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Kegiatan Rapat Koordinasi | 10.650.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 21.750.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar | 8.200.000 | |

| | | | | | Daerah | | |
|-----------------|--|--|---|---|---------------------------------------|------------|-----|
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Fasilitas Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase fasilitas pengadaan BMD | (Jumlah Fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi) x 100% | | 14.000.000 | DAU |
| 7.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia | | 14.000.000 | DAU |
| | | | | | Pengadaan Komputer | 10.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan Printer | 4.000.000 | |
| | | | | | Pengadaan AC Pelayanan | - | |
| | | | | | Pengadaan Kipas Angin Ruang Pertemuan | - | |
| | | | | | Pengadaan Proyektor | - | |
| 7.01.01.1.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia | | - | DAU |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------|-----------------|
| | | | | | Pengad aan Kendar aan Dinas Roda 2 | - | |
| 7.01.01 .1.07.0 2 | | | | | | | |
| 7.01.0 1.2.08 | Penyediaa n Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | Terlaksana y Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah | Persenta se fasilitasi penyedia an jasa penunjan g operasio nal kantor | (Jumlah Fasilitasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitasi Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang harus dipenuhi)x 100% | | 207.312.00 0 | DA U |
| 7.01.01 .2.08.0 1 | Penyediaa n Jasa Surat Menyurat | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersusun | | - | DA U |
| | | | | | Perjala nan Dinas Kurir | | |
| 7.01.01 .2.08.0 2 | Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersusun | | 36.000.000 | DA U |
| | | | | | Pembay aran Rekeni ng Listrik | 21.600.000 | |
| | | | | | Pembay aran Rekeni ng Interne t | 14.400.000 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--------------------|-----------------|
| 7.01.01 .2.08.0 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | 171.312.000 | DA U |
| | | | | | Pembayaran Upah Tenaga Kerja Bulanan | 159.600.000 | |
| | | | | | Pembayaran BPJS kesehatan Bagi Non ASN | 10.560.000 | |
| | | | | | Pembayaran BPJS Ketena gakerja an bagi Non ASN | 1.152.000 | |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD | (Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi)/(Jumlah Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100% | | 29.857.000 | DA U |
| 7.01.01 .2.09.0 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Terbayarknanya Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | 24.257.000 | DA U |
| | | | | | BBM dan Pelumas Kendaraan Roda 4 | 18.826.000 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|------------------|---------|
| | | | | | Pemeliharaan Kendaran Roda 4 | 4.563.000 | |
| | | | | | Pembayaran pajak Roda 2 dan Roda 4 | 868.000 | |
| 7.01.01 .1.09.0 3. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Terlaksananya pemeliharaan Alat Besar Yang dan dibayarkan perizinannya | Jumlah Unit Alat Besar Yang dipelihara yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | Jumlah Unit Alat Besar Yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya | | - | |
| | | | | | Pemeliharaan genset | - | |
| 7.01.01 .2.09.0 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 5.600.000 | DA U |
| | | | | | Pemeliharaan Printer | 1.300.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Komputer | 1.400.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan Laptop | 1.400.000 | |
| | | | | | Pemeliharaan AC | 1.500.000 | |
| 7.01.01 .209.09 . | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | - | |
| | | | | | Pemeliharaan Gedung | - | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|---|--|------------------|------------|
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kecamatan Sesuai SP dan SOP | Presentase Pelayanan Administrasi Kecamatan SP dan SOP | (Jumlah Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP terpenuhi/Jumlah Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP yang harus dipenuhi)*100% | | 1.130.000 | DAU |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | (Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang terpenuhi)/(Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan yang harus dipenuhi) *100% | | 1.130.000 | DAU |
| 7.01.02.2.01.01 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang tersusun | | 1.130.000 | DAU |
| | | | | | Pembinaan perangkat desa terkait pelayanan di desa | 630.000 | |
| | | | | | Monitoring dan evaluasi pelayanan di desa | 500.000 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|------------|---------|
| 7.01.0 2.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 % | | - | DA U |
| 7.01.02 .2.04.0 3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | - | DA U |
| | | | | | Sosialisasi Pelayanan, | - | |
| | | | | | Jemput Bola terkait KK dan KTP | - | |
| 7.01.0 3 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | rata-rata prosentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Jumlah (persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa + Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan) dibagi 2 | | 36.830.600 | DA U |
| 7.01.0 3.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa | jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan | | 24.830.600 | DA U |

| | | | | masyarakat desa yang direncanakan dikali 100 | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|--|------------------|---------|
| 7.01.03 .2.01.0 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 3.900.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Rapat Forum Musyawarah pembangunan desa | 2.400.000 | |
| | | | | | Monitoring Musrenbangdes | 1.500.000 | |
| 7.01.03 .2.01.0 2 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | 9.380.600 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Rapat Pelaksanaan Musrenbang | 9.380.600 | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|---|--------------------------------|------------|---------|
| | | | | | RKPD kecamatan | | |
| 7.01.03 2.01.03 | Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang tersusun | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 11.550.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Paskibraka | 11.550.000 | |
| | | | | | Fasilitasi Posyandu Gerbangmas | - | |
| | | | | | Fasilitasi Popkab | - | |
| | | | | | Fasilitasi Lumajang Mbiyen | - | |
| | | | | | Fasilitasi MTQ | - | |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan | Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan yang direncanakan x 100 % | | 12.000.000 | DA U |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|------------------|-------------------|---------|
| 7.01.03 .2.01.0 6.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara | Terlaksananya Kegiatan Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | | 11.115.000 | DA U |
| | | | | | Rapat Pleno | 4.500.000 | |
| | | | | | Rapat Pengurus | 3.240.000 | |
| | | | | | Rapat Kerja | 3.375.000 | |
| 7.01.03 .2.01.0 6.03 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | 885.000 | DA U |
| | | | | | Monev Pawon Urip | 885.000 | |
| 7.01.03 .2.01.0 6.05 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum | | - | DA U |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|--|---|---------|
| | an Rumah | | Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah | tentang Kepemilikan Rumah | | | |
| | | | | | Sosialisasi Rumah Layak Huni | - | |
| 7.01.03 .2.01.0 6.06 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | - | DA U |
| | | | | | Sosialisasi GALERI PELANGI (Gerakan Keluarga Indonesia Dalam Peningkatan Pendidikan dan Pengeluaran Ekonomi) | - | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|--|--|---------|
| 7.01.03 .2.06.0 7 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | - | DA U |
| | | | | | Sosialisasi gerakan sigap stunting ibu baduta terdampingi (gessit) untuk bumil KEK | |
| 7.01.03 .206.11 . | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga | | |
| | | | | | Sosialisasi Undang-undang KDRT | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|----------|---|-----------------|
| 7.01.03 .2.06.1 2 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Terlaksananya Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | - | DA U |
| | | | | | Stunting | | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM' | Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100 % | | - | DA U |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan | | - | DA U |
| 7.01.04 .2.01.0 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | | - | DA U |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|---|--|------------------|------------|
| | | Kecamatan | di Wilayah Kecamatan | Kecamatan | | | |
| | | | | | Pembinaan untuk Linmas | - | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 % | | 3.600.000 | DAU |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan | | 3.600.000 | DAU |
| 7.01.05.2.01.08 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Yang tersusun | | 3.600.000 | DAU |
| | | | | | Monitoring Wilayah terkait dengan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | 3.600.000 | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|------------|-----|
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa | Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu | (Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu /Jumlah Desa keseluruhan) *100% | 29.513.440 | DAU |
| | | | Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu | (Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu /Jumlah Desa keseluruhan) *100% | | |
| | | | Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu | (Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu /Jumlah Desa keseluruhan) *100% | | |
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi rekomendasi koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan | 29.513.440 | DAU |
| 7.01.06.2.01.01 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 3.600.000 | DAU |
| | | | | Penyusunan Perdes dan Perkad es | 3.600.000 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---|---|--|------------------|---------|
| 7.01.06 .2.01.0 2 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | 7.200.000 | DA U |
| | | | | | Pembinaan dan pengawasan Terpadu | 7.200.000 | |
| | | | | | Pembinaan perangkat desa terkait administrasi pemerintahan di desa | - | |
| 7.01.06 .2.01.0 3 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | - | DA U |
| | | | | | Monitoring dan Evaluasi pengelolaan keuangan desa | | |
| 7.01.06 .2.01.0 4 | Fasilitasi Penerapan dan penegakan peraturan perundangan | Tersusunnya Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | 8.400.000 | DA U |
| | | | | | Monev PBB | 8.400.000 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--|---|------------------|---------|
| 7.01.06 .2.01.0 5 | Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | - | DA U |
| | | | | | Fasilitasi pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |
| 7.01.06 .2.01.06 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang tersusun | | - | |
| | | | | | Fasilitasi Pilkades | | |
| 7.01.06 .2.01.0 7 | Fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Badan Permusyawaratan Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | - | DA U |
| | | | | | Fasilitasi pembinaan BPD | | |
| 7.01.06 .2.01.0 8 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | 1.800.000 | DA U |
| | | | | | Sosialisasi dan Konsultasi Pemberhentian / Pengangkatan | 1.800.000 | |

| | | | | | Prangk at desa | | |
|-------------------------|--|---|--|--|------------------------------------|----------------------|---------|
| 7.01.06 .2.01.0 9 | Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | 4.500.000 | DA U |
| | | | | | Fasilitasi Penyusunan RKPDes | 4.500.000 | |
| 7.01.06 .2.01.7 | Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya | Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan hasil Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | 4.013.440 | DA U |
| | | | | | Rapat Koordinasi pendampingan desa | 4.013.440 | |
| JUMLAH | | | | | | 1.738.451.497 | |

Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Tekung Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp.1.738.451.497**, yang bersumber dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum. Adapun untuk perincian kegiatan sebagai berikut .

Tabel 4.2
Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

| No | Uraian | Anggaran |
|----------|------------------------|----------------------|
| 1 | Belanja Operasi | 1.738.451.497 |
| 2 | Belanja Pegawai | 1.470.878.457 |
| 3 | Belanja Barang | 267.573.040 |
| | | |
| 4 | JUMLAH BELANJA | 1.738.451.497 |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tekung 2024 – 2026 yang memuat Tujuan dan Strategi, Arah Kebijakan, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Sesuai amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menyatakan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun berikutnya..

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tekung ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra – PD).

Dengan harapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Tekung, Februari 2024
CAMAT TEKUNG
KECAMATAN
TEKUNG
SARJITO WIBOWO, S.STP
NIP. 1930621 200112 1001



